

## Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Ida Kintamani

Peneliti pada Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Diknas, email:  
*idakintamani@yahoo.com*

*Abstrak:* Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kesenjangan gender dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilihat dari empat hal, yaitu 1) sasaran umum pendidikan bagi perempuan, 2) akses pendidikan bagi perempuan, 3) kontrol pendidikan bagi perempuan, dan 4) manfaat pendidikan bagi perempuan. Hasil penelitian adalah bahwa sasaran umum pendidikan menunjukkan kesenjangan gender pada SD (4,40%) dan SM (2,9%) akibat akses pendidikan yang dihitung dari angka masukan kasar juga ada kesenjangan sebesar 3,51%. Partisipasi mahasiswa dalam bentuk persentase mahasiswa PT pada teknologi (61,48%) dan IPA (52,01%) juga terjadi kesenjangan. Hal ini disebabkan karena pengelola lebih banyak laki-laki sehingga terjadi kesenjangan rata-rata sebesar 10,60% akibat kontrol pengambilan keputusan lebih didominasi laki-laki. Oleh karena dominannya laki-laki dalam penentu kebijakan sehingga perempuan tertinggal, hal ini ditunjukkan perempuan yang menduduki eselon hanya 20,34% sehingga ada kesenjangan (39,33%). Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga menunjukkan kesenjangan terutama pada SMP ke SMK (13,22%) dan hanya angka bertahan di semua jenjang yang lebih besar perempuan.

*Kata kunci:* gender, kesenjangan gender, pemerataan akses pendidikan, dan perluasan akses pendidikan

## **Pendahuluan**

Perubahan mendasar yang terjadi dalam aspek kehidupan manusia membawa pengaruh terhadap pola relasi gender, terutama dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan di semua bidang kehidupan khususnya di bidang pendidikan. Di tingkat dunia, sebagai respon terhadap situasi perempuan di seluruh dunia yang masih memprihatinkan, Konferensi Dunia tentang Hak Azasi Manusia di Wina tahun 1993 menegaskan perlunya langkah-langkah strategis untuk memajukan dan melindungi hak perempuan.

Deklarasi dan program aksi konferensi ini menegaskan tentang tiga hal, yaitu 1) hak azasi perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak azasi manusia; 2) partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya, pada semua tingkat nasional, regional, dan internasional serta penghapusan diskriminasi jenis kelamin; dan 3) kekerasan berbasis gender dalam segala bentuk sudah tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia sehingga harus dihapuskan (Syarif dan Murtadlo, 2002: 289).

Bagi Indonesia, hak azasi perempuan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Wina sejalan dengan ideologi Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan akses dan kontrol yang sama kepada penduduk perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam melaksanakan ketentuan UUD 1945 tersebut pemerintah telah meratifikasi berbagai bentuk konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik domestik maupun publik. Namun, berbagai indikator dan analisis pembangunan pendidikan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, kontrol, partisipasi dan penikmat pembangunan pendidikan, meskipun secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki.

Prioritas di bidang pendidikan diberikan antara lain pada peningkatan partisipasi siswa perempuan dalam mata pelajaran sains, matematika, dan teknik dalam upaya memberdayakan perempuan sebagai

sosok yang mandiri dan mampu berperan sebagai pelaku kegiatan pembangunan serta pemanfaat hasil pembangunan. Hal itu berarti bahwa, baik perempuan maupun laki-laki harus memperoleh akses pada pendidikan yang berkualitas berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan kesempatan.

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender mensyaratkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang strategis adalah melalui peningkatan pendidikan formal. Dengan meningkatnya pendidikan diharapkan agar kualitas sumber daya perempuan akan semakin meningkat pula, sehingga perempuan mampu memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin.

Salah satu aspek dalam menentukan peran serta perempuan dalam pembangunan adalah dengan meningkatkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga peran perempuan dalam pembangunan dapat ikut menentukan kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Makin tinggi tingkat pendidikan perempuan diharapkan akan makin

baik kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, sebagai bagian integral dan strategis dari isu-isu pembangunan yang masih terus dan tetap diungkapkan di berbagai forum nasional maupun internasional adalah isu gender. Salah satu forum internasional bahkan telah menetapkan tiga subtema dengan prioritas dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang mencakup ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Prioritas-prioritas dalam rangka peningkatan peran perempuan di segala sektor semakin digalakkan. Sumber daya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mempunyai hak, kesempatan dan kewajiban yang sama dalam pembangunan.

Di Indonesia, landasan yang ideal dan konstitusional terhadap kedudukan dan peranan perempuan telah dituangkan pada GBHN 1999 yang esensinya antara lain berbunyi: meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, namun dirasakan masih mengandung kesenjangan dalam hal kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pandangan tentang perbedaan dalam kesempatan dan perlakuan yang ditekankan atas dasar diskriminasi gender (*gender discrimination*) yang mengakibatkan kerugian bagi perempuan dalam kedudukan maupun perannya sebagai mitra sejajar laki-laki perlu dihilangkan.

Sejak dini usia, anak harus diperkenalkan dengan kesetaraan gender antara lain melalui pendidikan agar siswa perempuan di kemudian hari tidak tergiring untuk selalu menekuni bidang tradisional, sehingga kemampuan laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Selain itu, kemampuan perempuan dapat lebih berkembang antara lain pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memiliki kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif di segala kegiatan pembangunan terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya nasional maupun internasional.

Untuk mencapai kesetaraan dan kesejajaran gender di segala bidang, pengelolaan data berwawasan gender yang dilakukan secara sistematis, teratur dan berkesinambungan merupakan komponen utama dan penting dilakukan. Dengan mendasarkan data dan informasi yang baik dan dengan kebijakan yang tepat diharapkan dapat ditentukan kesetaraan dan kesejajaran gender.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah mengapa terjadi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan khususnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender, yaitu 1) Bagaimana sasaran umum pendidikan bagi perempuan?, 2) Bagaimana akses pendidikan bagi perempuan? 3) Bagaimana partisipasi pendidikan bagi perempuan? 4) Bagaimana kontrol pendidikan bagi perempuan? dan 5) Bagaimana manfaat pendidikan bagi perempuan?

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 1) sasaran umum pendidikan bagi perempuan 2) akses pendidikan bagi perempuan, 3) partisipasi pendidikan bagi perempuan, 4) kontrol pendidikan bagi perempuan, dan 5) manfaat pendidikan bagi perempuan.

### **Kajian Teori**

Teori yang dibahas di sini berkaitan dengan isu gender dan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Untuk itu, karena gender merupakan isu penting saat ini maka akan dibicarakan secara berturut-turut tentang gender dan kesenjangan gender. Kemudian dilanjutkan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang merupakan pilar kebijakan program pembangunan pendidikan. Untuk memahami kesenjangan gender maka dibahas pula penggunaan indikator pendidikan untuk menentukan adanya kesenjangan gender.

### **Gender**

Kata gender sudah menjadi bagian dari kamus yang dipakai sehari-hari oleh para pembuat kebijakan, pembuat keputusan, maupun para pelaksana pembangunan. Pemakaian kata gender sudah menjadi umum, begitu umumnya sampai istilah ini menjadi sebuah cantolan untuk memenuhi sebuah syarat pemberian bantuan yang sifatnya internasional. Kata ini sering diucapkan dan dituliskan untuk menyebut konsep apa pun yang ada hubungannya dengan sudut pandang gender. Namun, sesungguhnya pemahaman

yang tepat tentang istilah gender belum tersosialisasi dengan baik dan meluas sehingga masih banyak yang mengartikan bahwa gender adalah isu perempuan. Konsep gender sebagai suatu perbedaan yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan belum sepenuhnya dipahami. Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu apakah itu jenis kelamin, apakah itu gender, dan bagaimana peran gender.

Jenis kelamin adalah perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan. Jika disimak secara biologi dapat diketahui bahwa seseorang disebut laki-laki atau perempuan karena sifat-sifat biologi yang berbeda secara kodrati. Seseorang disebut perempuan karena memiliki alat reproduksi dengan organ tubuh yang berfungsi secara spesifik. Gender adalah identifikasi untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh budaya, termasuk di dalamnya peran dan kewajiban untuk laki-laki dan untuk perempuan, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, undang-undang, kebijakan, program dan lainnya sering memperkuat konstruksi budaya ini. Peran gender adalah berkaitan dengan peran, tugas, kegiatan pekerjaan yang dianggap sesuai dengan masing-masing jenis kelamin dalam masyarakat. (Rahardjo, 2001: 2).

Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dari segi biologi semata melainkan juga dari segi perilaku, jenis pekerjaan, sifat-sifat yang umumnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan serta dari selera model dan berbagai tradisi seperti kebiasaan, adat atau hal-hal lain yang sudah berakar di dalam kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Jadi, pembedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan masyarakat terjadi secara bersamaan yaitu pembedaan dalam bentuk biologis dan pembedaan menurut peran di dalam konteks sosial budaya yang dihidupkan oleh masyarakat. Pembagian yang secara biologis disebut perbedaan jenis kelamin atau seks, sedangkan pembedaan menurut sosial budaya masyarakat disebut gender. (Hatmadji, 2002: 7-8).

Secara lebih jelas, jenis kelamin atau seks adalah pembagian yang ditentukan oleh Tuhan atau juga disebut dengan kodrat Tuhan karena fungsinya tidak dapat ditukarkan ataupun diubah. Ketentuan ini telah ada sejak adanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan di bumi dan akan tetap ada sepanjang terdapat kehidupan manusia dan tidak mengenal tempat maupun suku, ras

ataupun bangsa. Gender adalah pembagian peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan secara berbeda yang ditetapkan oleh ketentuan sosial budaya dan masyarakat. Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat atau ketentuan dari Tuhan. (Women Support Project II, 2001: 10).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 22/Kep/Meneg/XII/99 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kantor Meneg PP, 2000) Pasal 56 bahwa Deputy II mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang kesetaraan dan kualitas hidup perempuan. (Supiandi, 2001: 1). Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi yang dijadikan prioritas Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan agar setiap sektor pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dapat melaksanakan pengarusutamaan gender secara mandiri dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan pengambilan keputusannya.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), mengharapkan *Gender Mainstreaming* (pengarusutamaan gender) dimasukkan ke dalam setiap

kebijakan serta perencanaan dan proses pembangunan pendidikan karena gender membantu untuk mengerti sikap, kebutuhan, dan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat didasarkan pada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik maka gender harus dianggap sebagai bagian dari analisis umum terhadap suatu aktivitas, kebijakan, program, aktivitas atau proses. Gender seharusnya diarusutamakan dan tidak dianggap sebagai isu yang terpisah. (Supiandi, 2001: 3).

Pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan masyarakat. (Women Support Project II, 2000: 1). Secara singkat, pegarusutamaan gender merupakan pendekatan yang mengintegrasikan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, program, proyek, dan institusi pemerintah.

### **Kesenjangan Gender**

Kebijakan nasional dalam sektor pendidikan seperti yang tertuang dalam GBHN 1999 tidak secara eksplisit menyatakan isu keseimbangan gender. Namun terdapat empat butir kebijakan pendidikan yang dapat digenderkan, yaitu 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada setiap jenjang pendidikan; 2) melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik; dan 3) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan iptek dan seni. (Suryadi, 2000: 1).

Gambaran kesenjangan gender dikelompokkan ke dalam tiga permasalahan dasar pendidikan yaitu pemerataan dan akses pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; kurikulum dalam proses pendidikan, serta penjurusan dan program studi dalam pendidikan nasional. Dalam hal akses pendidikan, beberapa kesenjangan dalam pendidikan menurut gender dapat diamati, yaitu 1) kesenjangan dalam

perolehan pendidikan menurut gender pada setiap jenjang pendidikan pada saat sekarang sedikit berubah polanya jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu; 2) pada tahun 1960-an kesenjangan gender dalam perolehan kesempatan pendidikan belum dianggap sebagai hal yang luar biasa sehingga belum mengundang banyak perhatian para pengamat pendidikan dan pengelola pendidikan; dan 3) program perluasan pendidikan di SD sejak tahun 1970-an berdampak cukup besar terhadap pemerataan pendidikan pada jenjang di atasnya sehingga pemerataan pendidikan makin seimbang berdasarkan gender. (Suryadi, 2000: 1).

### **Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan**

Pilar kebijakan di bidang pendidikan nasional terdiri dari tiga kebijakan, yaitu 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; dan 3) manajemen pendidikan nasional. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan atau biasa disebut pemerataan pendidikan merupakan isu strategi dan prioritas yang pertama dalam pembangunan pendidikan nasional. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. (Depdiknas, 2007: 17).

Kebijakan pemerataan dan perluasan akses ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen masyarakat. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata. (Ida Kintamani, 2005: 24).

### **Indikator yang Digunakan**

Untuk dapat mencapai kebijakan tersebut, indikator dan parameter pendidikan yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah angka partisipasi, angka masukan, persentase mahasiswa menurut program studi, persentase guru menurut jenjang pendidikan, persentase kepala sekolah menurut jenjang pendidikan, persentase siswa menurut jenjang pendidikan, angka

bertahan, dan angka melanjutkan.  
(Depdiknas, 2002: 24).

Angka partisipasi adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan penduduk usia sekolah yang sesuai, misalnya siswa tingkat SD dengan penduduk usia 7-12 tahun (Depdiknas, 2002: 25). Angka masukan kasar adalah perbandingan antara siswa tingkat I SD dengan penduduk usia masuk sekolah, misalnya siswa baru tingkat I SD dengan penduduk usia 7 tahun

(Depdiknas, 2002: 28). Angka bertahan adalah siswa yang berada di sekolah sampai tahun terakhir setiap jenjang pendidikan (Depdiknas, 2002: 73). Angka melanjutkan adalah perbandingan antara siswa baru tingkat I jenjang tertentu dengan lulusan jenjang sebelumnya (Depdiknas, 2002: 34).

Untuk memudahkan dalam memahami indikator di atas, di bawah ini diberikan rumusan secara matematis sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Kasar

Rumus:

$$\text{APK: } \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$$

- \*) Tingkat SD: kelompok usia 7-12 tahun
- Tingkat SMP: kelompok usia 13-15 tahun
- Tingkat SM: kelompok usia 16-18 tahun
- Tingkat PT: kelompok usia 19-24 tahun

b. Angka Masukan Kasar

Rumus:

$$\text{AMK: } \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I SD *)}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 tahun **)}} \times 100$$

\*) SD dan MI

\*\*\*) usia resmi masuk SD dan MI

c. Angka Bertahan

Rumus:

$$AB: \frac{\text{Jumlah siswa bertahan}}{6000 * ) \text{ atau } 3000 **)}$$

\*) khusus tingkat SD atau jenjang pendidikan 6 tahun yaitu 6000

\*\*) untuk tingkat SMP dan SM atau jenjang pendidikan 3 tahun yaitu 3000

d. Angka Melanjutkan

Rumus:

$$AM: \frac{\text{Jumlah SBI pada jenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah Lls pada jenjang pendidikan yang lebih rendah **)}} \times 100$$

tahun ajaran sebelumnya

SBI adalah siswa baru tingkat I

Lls adalah lulusan

\*) Tingkat SMP, Tingkat SM, dan Tingkat PT

\*\*) Tingkat SD, Tingkat SMP, dan Tingkat SM

Indikator pendidikan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilengkapi dengan indikator pengarusutamaan gender untuk mengukur kesenjangan gender. Indikator pengarusutamaan gender terdiri dari empat jenis, yaitu 1) indikator masukan, 2) indikator proses, 3) indikator keluaran, dan 4) indikator *in pak* (*outcome*). Dari keempat indikator pengarusutamaan gender, hanya indikator keempat yaitu indikator *in pak* yang digunakan

dalam mengukur kesenjangan gender. Indikator keempat tersebut dirinci berdasarkan masalah utama yang dihadapi dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang dijadikan data pembuka wawasan, kemudian dilihat dari segi akses pendidikan, partisipasi pendidikan, kontrol pendidikan, dan manfaat pendidikan. (Supiandi, 2001: 8).

Dengan menggunakan kedua jenis indikator yang digabungkan, yaitu 1) indikator pendidikan untuk

pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan 2) indikator pengurusan gender yang keempat (impak) maka diperoleh 10 indikator, yaitu 1) angka partisipasi kasar, 2) angka masukan kasar, 3) persentase mahasiswa menurut program studi, 4) persentase penduduk perempuan usia 16 tahun kurang telah menikah, 5) persentase guru menurut jenjang pendidikan, 6) persentase kepala sekolah menurut jenjang pendidikan, 7) persentase perempuan dalam posisi birokrasi, 8) persentase siswa/mahasiswa menurut jenjang pendidikan, 9) angka bertahan, dan 10) angka melanjutkan.

Dengan mendasarkan pada teori yang telah dijelaskan di atas dan permasalahan yang ada dalam tulisan ini maka hasil dan bahasan ini diurutkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini.

#### **Basaran Umum**

Kebijakan pertama di bidang pendidikan nasional adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Basaran dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah mengusahakan kesempatan belajar atau memperoleh pendidikan bagi semua warga negara pada setiap jenjang pendidikan dari tingkat SD

sampai PT. Kondisi ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003).

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa sepanjang tidak menimbulkan kesenjangan-kesenjangan gender (*gender inequalities*). Akan tetapi, realita di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk kesenjangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki terlebih lagi bagi perempuan. Kesenjangan gender terwujud dalam banyak bentuk, di antaranya berupa pemberian beban kerja yang lebih panjang dan berat kepada perempuan, terutama perempuan pekerja.

Di bidang pendidikan, kesenjangan tersebut nampak pada mereka yang berada di sekolah yang terdapat pada Tabel 1. Kesempatan memperoleh pendidikan yang dihitung dari angka partisipasi kasar (APK) bagi perempuan dan laki-laki masih belum menunjukkan kesenjangan yang signifikan, untuk SD sebesar 4,40% dan SM sebesar 2,90%. Namun, bila dilihat partisipasi siswa perempuan pada tahun 2005 dan 2006 jika dibandingkan dengan siswa laki-laki khusus SD justru menurun sedangkan untuk SMP sampai PT meningkat cukup signifikan sekitar 2%.

**Tabel 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2003-2006**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2003	2004	2005	2006	Perbedaan Gender
SD	Perempuan	113.66	112.14	113.24	112.04	4.40
	Laki-laki	115.37	115.51	114.85	116.44	
	Rata2	114.53	113.85	114.06	114.27	
SMP	Perempuan	78.28	75.45	86.64	88.79	-0.20
	Laki-laki	78.58	73.10	83.86	88.59	
	Rata2	78.43	74.25	85.22	88.68	
SM	Perempuan	45.38	49.02	52.13	54.74	2.90
	Laki-laki	52.12	50.65	52.26	57.64	
	Rata2	48.79	49.85	52.20	56.22	
PT	Perempuan	14.42	13.88	14.61	16.81	-0.21
	Laki-laki	14.09	14.64	15.40	16.60	
	Rata2	14.25	14.26	15.00	16.70	

Sumber: Indikator Pendidikan 2006/2007, Depdiknas, 2007

Bila keadilan yang akan diusahakan dalam pendidikan maka dituntut suatu usaha khusus untuk membuang jauh-jauh semua kesenjangan atau ketidaksamaan antar-kelamin di bidang pendidikan. Kesenjangan gender terletak pada akar situasi inferioritas kekal yang mempengaruhi perempuan pada setiap tahap kehidupannya. Berdasarkan penelitian yang ada, telah diketahui adanya korelasi antara tingkat pendidikan perempuan dengan perbaikan menyeluruh di bidang kesehatan dan gizi penduduk serta turunnya tingkat kesuburan.

### Akses Pendidikan

Perluasan akses pendidikan di tingkat SD dan tingkat SMP telah disediakan melalui program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun. Demikian pula akses pendidikan di Sekolah Menengah telah disediakan oleh pemerintah dan swasta, sedangkan akses pendidikan di Perguruan Tinggi sebagian besar diserahkan pada mekanisme pasar karena jumlah lembaga maupun mahasiswa pada perguruan tinggi swasta (PTS) lebih besar jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

Pada tahun 2006/2007 angka masukan kasar (AMK) atau siswa yang masuk ke SD pada Tabel 2 menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu 3,51 % dengan AMK untuk perempuan sebesar 128,60 % berbanding 132,11 % untuk laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak awal anak masuk sekolah telah terjadi kesenjangan gender. Jadi,

sudah sewajarnya jika pada jenjang yang lebih tinggi siswa perempuan selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan siswa laki-laki.

Kesenjangan gender dalam AMK ini akibat adanya bentuk subordinasi yakni adanya anggapan bahwa perempuan tidak penting bersekolah karena hanya sebagai pelengkap dari kepentingan laki-laki. Pada masyarakat tertentu, masih kuat anggapan bahwa sifat perempuan tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosinya sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin. Selain itu, terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena pada akhirnya harus mengurus rumah tangga atau masak di dapur. Hal ini juga merupakan salah satu budaya masyarakat kita.

### Partisipasi Pendidikan

Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan menurut gender semakin

berimbang pada pendidikan dasar dan menengah (umum), namun kesenjangan mulai terjadi pada pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan vokasi, perempuan lebih dominan pada program studi sosial (IPS). Hal ini juga terjadi pada pendidikan tinggi, perempuan lebih dominan pada program studi ilmu sosial seperti kependidikan serta bisnis dan manajemen, sedangkan laki-laki lebih dominan pada program studi teknik/teknologi dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Persentase mahasiswa PT menurut program studi dan jenis kelamin pada tahun 2006/2007 sebagaimana terlihat pada Tabel 3 menunjukkan adanya kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki khususnya pada program studi nonkependidikan yaitu sekitar 17,91% (41,04% perempuan berbanding 58,96% laki-laki). Untuk program studi kependidikan ternyata

**Tabel 2 Angka Masukan Kasar (AMK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2006/2007**

No.	Variabel	Perempuan	Laki2	Jumlah	Perbedaan
1	Siswa baru SD	2,519,370	2,676,319	5,195,689	
	%	48.49	51.51	100.00	3.02
2	Penduduk 7 tahun	1,959,100	2,025,900	3,985,000	
	%	49.16	50.84	100.00	1.68
	Angka Masukan	128.60	132.11	130.38	3.51

Sumber: Indikator Pendidikan 2006/2007, Depdiknas, 2007

mahasiswa perempuan lebih dominan jika dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki yaitu 53,10 % berbanding 46,90%. Padahal pendidikan pada jenjang perguruan tinggi akan mempengaruhi kualitas sumber daya tenaga kerja dan peran perempuan di masyarakat.

Dari segi minat, terlihat bahwa laki-laki lebih dominan memilih jurusan atau program studi keterampilan atau keahlian pada bidang-bidang kejuruan teknologi dan industri atau ilmu-ilmu keras. Hal ini didukung oleh data yang terdapat pada Tabel 3 bahwa 80,74 % laki-laki memilih jurusan teknologi dan 76,00% memilih jurusan IPA. Sebaliknya, perempuan lebih banyak memilih

keahlian terapan seperti Ekonomi dan Bisnis serta IPS yaitu sebesar 52,50% dan 52,70%. Penjurusan pada pendidikan tinggi mengindikasikan masih adanya stereotipe dalam sistem pendidikan yang berdampak pada tidak berkembangnya pola kompetisi yang rasional menurut gender.

Bila dihubungkan dengan penduduk perempuan yang telah menikah sebelum usia 16 tahun (Tabel 4) terlihat bahwa lebih dari 11% perempuan telah melangsungkan pernikahannya. Di samping itu, perempuan di pedesaan lebih banyak yang telah menikah dibandingkan dengan perempuan di perkotaan dan selama 5 tahun terjadi fluktuasi

**Tabel 3 Persentase Mahasiswa PT menurut Program Studi dan Jenis Kelamin Tahun 2006/2007**

No.	Program Studi	Perempuan	Laki2	Jumlah	Perbedaan
1	Kependidikan	223,290	197,255	420,545	
	%	53.10	46.90	16.28	-6.19
2	Nonkependidikan	887,650	1,274,992	2,162,642	
	%	41.04	58.96	83.72	17.91
	a. Teknologi	74,341	311,666	386,007	
	%	19.26	80.74	17.85	61.48
	b. Ekonomi dan Bisnis	436,950	395,349	832,299	
	%	52.50	47.50	38.49	-5.00
	c. IPS	273,240	245,258	518,498	
	%	52.70	47.30	23.98	-5.40
	d. IPA	102,180	323,658	425,838	
	%	24.00	76.00	19.69	52.01
Jumlah		1,110,940	1,472,247	2,583,187	
	%	43.01	56.99	100.00	13.99

Sumber: Indikator Pendidikan 2006/2007, Depdiknas, 2007

**Tabel 4 Persentase Perempuan Usia 16 Tahun Kurang Telah Menikah menurut Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2000—2005**

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Rata2	Perbedaan
2000	10.9	17.1	14.6	-6.2
2001	10.8	15.7	13.7	-4.9
2002	9.4	14.6	12.4	-5.2
2003	9.1	13.9	11.9	-4.8
2004	8.9	13.3	11.5	-4.4
2005	9.4	15.0	12.6	-5.6

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2006

namun pada tahun 2005 mencapai 12,6% dan pedesaan (15,0%) lebih besar dari perkotaan (9,4%) sehingga kesenjangan meningkat menjadi 5,6%. Selain itu, pernikahan pada usia muda merupakan salah satu penyebab dan mendukung rendahnya partisipasi mahasiswa perempuan di perguruan tinggi.

Banyaknya perempuan yang menikah pada usia sekolah terlebih di pedesaan juga disebabkan adanya budaya masyarakat bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi atau malu bila anak perempuannya dianggap tidak laku untuk menikah. Dipandang dari segi pendidikan terdapat tiga alasan, yaitu 1) tidak tersedianya sarana dan prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SMP ke atas di daerah sekitar tempat tinggal karena alasan jarak dan keselamatan selama perjalanan menuju sekolah, banyak orang tua keberatan menyekolahkan anak

perempuannya ke jenjang yang lebih tinggi; 2) tingginya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau oleh kebanyakan penduduk yang tinggal di pedesaan; dan 3) masih dianutnya sejumlah norma yang merugikan perempuan, misalnya pandangan yang menyatakan bahwa anak perempuan lebih diperlukan dalam membantu orang tua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu menambah penghasilan keluarga (Syarief dan Murtadlo, 2002: 290-291).

#### **Kontrol Pendidikan**

Kontrol untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan sangat ditentukan oleh faktor sosio-kultural masyarakat yang umumnya masih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kontrol untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan masih sangat didominasi

oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari jumlah guru yang ada pada Tabel 5, walaupun jumlah guru perempuan di TK dan SD paling besar. Di semua jenjang pendidikan (kecuali TK dan SD) guru perempuan hanya sekitar 32—48%, bahkan di SMK hanya 39,24% dan PT sebesar 32,41%.

Begitu pula posisi perempuan sebagai pengambil keputusan di tingkat sekolah yang terdapat pada Tabel 6 sangat kecil proporsinya di semua jenjang pendidikan, yaitu

hanya sekitar 11% di tingkat SM kecuali di SD yang mencapai 34,70% dan TK sebesar 96,40%. Kecilnya kepala sekolah perempuan ini menyebabkan tidak adanya dorongan dari kepala sekolah terhadap siswa perempuan agar mereka tetap tinggal di sekolah. Partisipasi siswa perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih rendah juga akibat pengambil keputusan di sekolah masih banyak didominasi oleh laki-laki.

**Tabel 5 Persentase Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006/2007**

Jenjang Pendidikan	Perempuan	%	Laki2	%	Jumlah	Perbedaan Gender
TK	214,755	96.56	7,656	3.44	222,411	-93.12
SD	797,851	57.58	587,784	42.42	1,385,635	-15.16
SMP	302,381	48.40	322,345	51.60	624,726	3.20
SM	216,203	43.69	278,706	56.31	494,909	12.63
a. SMA	134,155	46.94	151,663	53.06	285,818	6.13
b. SMK	82,048	39.24	127,043	60.76	209,091	21.52
PT	75,392	32.41	157,221	67.59	232,613	35.18
Jumlah	1,606,582	54.27	1,353,712	45.73	2,960,294	-8.54

Sumber: Indikator Pendidikan 2006/2007, Depdiknas, 2007

**Tabel 6 Persentase Kepala Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006/2007**

Jenjang Pendidikan	Perempuan	%	Laki2	%	Jumlah	Perbedaan Gender
TK	51,678	96.40	1,931	3.60	53,609	-92.80
SD	50,838	34.70	95,680	65.30	146,518	30.61
SMP	3,418	13.85	21,268	86.15	24,686	72.31
SM	1,807	11.14	14,421	88.86	16,228	77.73
a. SMA	1,114	11.36	8,692	88.64	9,806	77.28
b. SMK	693	10.79	5,729	89.21	6,422	78.42
Jumlah	107,741	44.70	133,300	55.30	241,041	10.60

Sumber: Rangkuman Statistik Perskolahan 2006/2007, Depdiknas, 2007

Kontrol terhadap kebijakan pendidikan lebih didominasi oleh laki-laki mengingat laki-laki lebih banyak berada pada posisi strategis dalam pengelolaan pendidikan terutama dalam jabatan struktural, mulai dari pengelolaan pendidikan tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu di sekolah. Kondisi ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan juga relatif masih rendah. Akibatnya, sejumlah kebijakan dalam pendidikan dipandang belum sensitif gender tetapi lebih banyak menguntungkan pihak laki-laki.

#### Manfaat

Berdasarkan kenyataan, jumlah perempuan dalam posisi birokrasi di bidang pendidikan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat pada Tabel 7 di mana perempuan yang memiliki jabatan eselon I

hanya 10,40%, kecuali untuk eselon IV dan V sebesar 22,72% dan 22,10%. Bahkan, untuk eselon II hanya sebesar 6,70%. Kesenjangan gender tahun 2006 pada semua eselon adalah 59,33% sedangkan yang terbesar pada eselon II yaitu 86,60%. Kenyataan ini juga merupakan salah satu sebab mengapa keputusan tentang pendidikan yang diambil di tingkat pusat sering tidak menguntungkan perempuan.

Faktor manfaat terlihat dari dominannya laki-laki dalam posisi sebagai penentu kebijakan, khususnya dalam lembaga birokrasi di bidang pendidikan, demikian juga pada jabatan-jabatan akademis kependidikan. Kondisi ini terjadi akibat perempuan tertinggal jauh dalam memperoleh kesempatan pendidikan sejak tiga dekade yang lalu (40 tahun). Oleh karena itu, laki-laki lebih banyak menikmati posisi strategis dalam jabatan-jabatan struktural.

**Tabel 7 Persentase Perempuan dalam Posisi Birokrasi Kependidikan Tahun 2006**

Eselonisasi	Perempuan	%	Laki-laki	%	Jumlah	Perbedaan
Eselon I	62	10.40	534	89.60	596	79.19
Eselon II	709	6.70	9.870	93.30	10.579	86.60
Eselon III	7.156	13.70	45.079	86.30	52.235	72.60
Eselon IV	45.240	22.72	153.900	77.28	199.140	54.56
Eselon V	2.815	22.10	9.922	77.90	12.737	55.80
Jumlah	55.982	20.34	219.305	79.66	275.287	59.33

Sumber: Statistik Indonesia 2007, hal 86.

Rata-rata hanya sebesar 20,34% perempuan yang duduk dalam posisi di pemerintahan (eselon I sampai V) menyebabkan jumlah siswa perempuan yang terdapat pada Tabel 8 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan siswa laki-laki yaitu rata-rata hanya 48,55%. Selain itu, kondisi ini disebabkan karena sikap sebagian besar orang tua yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku serta kondisi ekonomi keluarga mengakibatkan prioritas pendidikan lebih ditujukan untuk anak laki-laki daripada anak perempuan.

Walaupun partisipasi perempuan terhadap pendidikan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki kecuali TK dan SMA (Tabel 8), tetapi angka bertahan siswa perempuan yang terdapat pada Tabel 9 lebih besar jika dibandingkan dengan siswa laki-laki di semua jenjang pendidikan persekolahan. Hal ini

menunjukkan bahwa siswa perempuan yang sudah berada di sekolah ternyata lebih bertahan bersekolah jika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Siswa perempuan yang dapat bertahan menunjukkan kondisi yang hampir seimbang sekitar 98 % di semua jenjang sedangkan SD yang paling rendah (94,73 %). Hal ini membuktikan makin tinggi jenjang pendidikan siswa perempuan makin dapat bertahan.

Masih pada Tabel 9, bila dilihat kesenjangan gender maka di semua jenjang terdapat kesenjangan gender yang lebih besar perempuan dengan nilai terendah di SMP (-2,74%) sedangkan yang tertinggi adalah di SMK (-3,42%). Kesenjangan gender juga terlihat pada angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang terdapat pada Tabel 10. Angka melanjutkan perempuan dari tingkat SD sampai PT pada umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-

**Tabel 8 Persentase Siswa menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006**

Jenjang Pendidikan	Perempuan	%	Laki2	%	Jumlah	Perbedaan Gender
TK	1,373,105	50.11	1,367,344	49.89	2,740,449	-0.21
SD	12,673,016	48.23	13,604,429	51.77	26,277,445	3.54
SMP	4,151,403	49.19	4,288,359	50.81	8,439,762	1.62
SM	2,864,000	47.78	3,129,578	52.22	5,993,578	4.43
a. SMA	1,868,421	52.02	1,723,425	47.98	3,591,846	-4.04
b. SMK	995,579	41.45	1,406,153	58.55	2,401,732	17.09
PT	1,216,706	50.04	1,214,908	49.96	2,431,614	-0.07
Jumlah	22,278,230	48.55	23,604,618	51.45	45,882,848	2.89

**Tabel 9 Angka Bertahan menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006/2007**

No.	Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki2	Rata2	Perbedaan
1	SD	94.73	91.60	93.10	-3.13
2	SMP	97.89	95.15	96.49	-2.74
3	SM	98.23	95.01	96.52	-3.22
	a. SMA	98.31	95.29	96.84	-3.02
	b. SMK	98.07	94.65	96.04	-3.42

laki kecuali melanjutkan ke SMA dan ke PT. Angka melanjutkan dari SD ke SMP menunjukkan kesenjangan gender karena ada perbedaan sebesar 2,79%. Pada tingkat SM, lulusan SMP yang melanjutkan ke SM terjadi kesenjangan gender sebesar 8,90%, sedangkan ke SMK sangat besar perbedaannya dengan perempuan hanya 30,51% dan laki-laki 43,73% sehingga kesenjangan gender menjadi 13,22%.

Sesuai dengan siswa perempuan yang bertahan di sekolah lebih besar daripada laki-laki maka angka melanjutkan (AM) juga lebih besar

perempuan. Dengan mengacu pada Tabel 10, dapat diketahui perbedaan antara siswa perempuan dan laki-laki yang melanjutkan ke PT sebesar 3,30 % lebih banyak perempuan. Hal yang sama terjadi di semua program di PT. Lulusan SM perempuan yang melanjutkan ke program Diploma, Strata, Kependidikan dan Non-kependidikan lebih besar perempuan daripada laki-laki dan menunjukkan perbedaan antara 1,27% sampai 2,63%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak yang melanjutkan ke PT dibandingkan dengan laki-laki.

**Tabel 10 Angka Melanjutkan menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006/2007**

No.	Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki2	Rata2	Perbedaan
1	SD ke SMP	80.61	83.40	82.03	2.79
2	SMP ke SM	84.73	93.63	89.18	8.90
	a. SMP ke SMA	54.21	49.89	52.05	-4.32
	b. SMP ke SMK	30.51	43.73	37.13	13.22
3	SM ke PT	42.27	38.96	40.50	-3.31
	a. SM ke PT Diploma	9.42	7.38	8.31	-2.04
	b. SM ke PT Strata	32.85	31.58	32.19	-1.27
	c. SM ke PT Kependidikan	6.20	4.97	5.56	-1.23
	d. SM ke PT Nonkependidikan	36.63	34.00	34.98	-2.63

Sumber: Rangkuman Statistik Pendidikan, Depdiknas, 2007

## **Penutup**

### **Simpulan**

Pilar kebijakan pendidikan pertama adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Dalam kebijakan tersebut diharapkan tidak ada kesenjangan gender. Namun, ternyata kesenjangan gender telah terjadi sejak lama, hal ini ditunjukkan pada APK selama empat tahun terutama pada SD dan SM yaitu sebesar 4,40 % dan 2,90 %. Hal yang sama pada akses pendidikan yang diukur dari AMK SD terjadi kesenjangan gender sebesar 3,51%.

Kesenjangan gender juga terjadi pada partisipasi siswa yang berada di pendidikan persekolahan. Perempuan lebih banyak bersekolah di program kependidikan (53,10%), program studi ekonomi dan bisnis (52,50%) sedangkan laki-laki banyak bersekolah di program nonkependidikan (%8,96%), yaitu program studi teknologi (80,74%) dan IPA (76,00%). Hal ini dibuktikan dengan perbedaan sebesar 61,48% pada teknologi dan 52,01% pada IPA. Kecilnya partisipasi perempuan di jenjang yang lebih tinggi akibatnya banyaknya perempuan yang telah menikah sebelum usia 16 tahun baik di pedesaan maupun di perkotaan (15,0% dan 9,4%).

Kesenjangan gender terjadi pada kontrol pendidikan yang diukur dari kepala sekolah atau pengelola pendidikan persekolahan. Kesenjangan tersebut terjadi di semua jenjang pendidikan kecuali kepala sekolah TK. Hal ini ditunjukkan dengan banyak kepala sekolah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Makin tinggi jenjang pendidikan makin banyak kepala sekolah laki-laki dan perbedaan terbesar pada SM yaitu 77,73% dan terkecil pada SD yaitu 30,61%.

• Kesenjangan gender pada manfaat diukur dari posisi pendidikan persekolahan akibat posisi perempuan pada birokrasi sangat kecil, yaitu 20,34%. Posisi perempuan pada eselon II yang terkecil yaitu 6,70% dan terbesar pada eselon IV, yaitu 22,72% sehingga terjadi perbedaan sebesar 59,33%. Walaupun jumlah perempuan yang bersekolah lebih kecil daripada laki-laki, namun pada umumnya, perempuan lebih mampu bertahan bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan AB perempuan pada semua jenjang pendidikan lebih besar perempuan dengan kesenjangan antara 2,74% di SMP sampai 3,42% di SMK. Seperti halnya AB maka hanya AM ke PT ternyata lebih

besar perempuan, yaitu 42,27% berbanding 38,97% sehingga kesenjangan sebesar 4,32%.

### **Saran**

Agar pilar kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat tercapai maka kesenjangan gender harus diperkecil dengan cara menghilangkan kesenjangan nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga agar ada kesamaan pendidikan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk dapat meningkatkan peluang bagi perempuan untuk masuk sekolah perlu dilakukan kebijakan khusus seperti memperbaiki sistem penerimaan siswa baru di SD dengan cara memberikan tempat untuk siswa baru perempuan terlebih dahulu atau diberikan kuota tertentu untuk siswa baru perempuan.

Selain itu, bagi siswa yang berasal dari sosial ekonomi yang lemah supaya dipertimbangkan pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa juga selayaknya diutamakan untuk siswa perempuan yang memang berminat untuk sekolah atau diberikan kuota tertentu untuk siswa perempuan ketika pertama masuk sekolah.

Kesenjangan pada partisipasi pendidikan hendaknya diperkecil dengan memberi peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki

bersekolah di PT. Selain itu, perlu adanya ketentuan agar perempuan yang masih dalam usia sekolah tidak menikah sebelum menyelesaikan sekolahnya sampai lulus. Selain itu, agar dilaksanakan peningkatan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua program studi pada PT melalui penetapan jumlah tertentu yang diperuntukkan perempuan terutama pada program studi yang saat sekarang banyak didominasi oleh laki-laki seperti teknologi dan IPA pada PT. Untuk mendukung peningkatan peluang itu, dapat diberikan beasiswa pada perempuan khusus program studi yang cenderung diikuti oleh laki-laki dan perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru yang dapat menyeimbangkan jumlah mahasiswa menurut program studi dan gender. Selain itu, pendapat bahwa teknologi dan pekerjaan yang membutuhkan jasmani hanya cocok untuk laki-laki harus dihilangkan.

Kesenjangan pengelola pendidikan perlu diubah dengan lebih meningkatkan kesadaran gender terutama bagi pengelola pendidikan seperti pejabat di daerah, pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam peranan gender yang lebih seimbang pada proses pendidikan.

Pada umumnya, perempuan lebih mampu bertahan bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik bagi perempuan. Namun, tidak menutup kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah penyebab laki-laki kurang dapat bertahan di sekolah jika dibandingkan dengan perempuan.

Dalam rangka pembangunan bidang pendidikan menuju kesetaraan dan keadilan gender, sasaran kebijakan gender adalah 1) membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis, dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender; 2) mengurangi aspek diskriminasi gender dalam perolehan kesempatan belajar pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai keahlian profesionalisme; dan 3) berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam

seluruh tahapan pembangunan pendidikan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi.

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara optimal maka perlu dilakukan lima hal, yaitu 1) perlu ditingkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya atas dasar gender pada semua bidang dan tingkatan pendidikan; 2) mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan; 3) meningkatkan partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan dari tingkat sekolah sampai pusat; 4) para penulis dan penanggung jawab dalam pengembangan kurikulum supaya menggunakan perspektif kesetaraan dan keadilan gender; dan 5) memberikan peluang kepada perempuan pada semua jenjang pendidikan dengan cara pemberian beasiswa atau subsidi dan kuota.

### **Pustaka Acuan**

- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Data dan Indikator untuk Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: Roren
- Hatmadji, S.H. 2001. *Situasi dan Isu Gender di Indonesia*. Jakarta: Kantor

Meneg PP

Ida Kintamani. 2005. *Data dan Indikator Pendidikan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan

Kantor Meneg PP. 2000. *Gender Based-Analysis: A Quick Guide for Policy Maker*. Jakarta

Raharjo, Yulfita. 2001. *Pengantar Analisis Gender*. Jakarta: LIPI

Supiandi, Yusuf. 2001 *Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)*. Jakarta: Kantor Meneg PP

Suryadi, A. 2000. *Aplikasi Gender Analysis Pathway di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Balitbang

Syarief, I., dan Murtadlo, D. 2000. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Women Support Project II. 2000. *An End: Project and Forward Looking Review*. Jakarta: Kantor Meneg PP

Women Support Project II. 2001. *Gender Related Concept Glossary*. Jakarta: CIDA